



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

- Rapat ke : 20 (*dua puluh*)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), dan PT Djakarta Llyod (Persero).
- Hari, Tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Faisol Riza, S.S., Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- A c a r a : 1. Perkenalan;
2. Pembahasan isu aktual di masing-masing BUMN, dan
3. Lain-lain.
- Hadir : 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Direktur Utama PT Pelindo I (Persero), Dian Rachmawan;
3. Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Elvyn G. Masasya;
4. Direktur Utama PT Pelindo III (Persero), Doso Agung;
5. Direktur Utama PT Pelindo IV (Persero), Farid Padang;
6. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi;
7. Direktur Utama PT Pelni (Persero), Insan Purwarisya L. Tobing, dan
8. Direktur Utama PT Djakarta Llyod (Persero), Suyoto;
beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelnindo (Persero), dan PT Djakarta Llyod (Persero) pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 10 Februari 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza, S.S.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero) untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pengembangan jasa pelabuhan antara lain yaitu peningkatan sistem jaringan dan layanan transportasi yang terintegrasi secara intermoda/multimoda yang terkoneksi keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan, memperhatikan aspek *dwelling time* agar dapat mempermudah proses ekspor dibandingkan proses impor, mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis yang terbaik, dan deregulasi sistem ekspor impor yang terkait dengan kemudahan pelayanan jasa kepelabuhanan.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk terus dapat menyediakan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan yang handal, terintegrasi untuk mendukung konektivitas, logistik dan pariwisata, serta mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis yang terbaik.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk terus dapat menjaga aksesibilitas, dan konektivitas layanan transportasi laut antar pulau terutama untuk Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (T3P) dalam rangka mendukung logistik dan pariwisata, serta mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 untuk mendukung pelayanan bisnis yang terbaik.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Djakarta Lloyd (Persero) untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi pengelolaan *shipping line* dan *logistic service* dalam rangka meningkatkan *topline* usaha melalui sinergitas Badan Usaha Milik Negera (BUMN) dan Swasta serta restrukturisasi modal dalam rangka menghilangkan akumulasi kerugian di masa lalu, dan mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis yang terbaik.
5. Sehubungan dengan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memberi masukan tentang Sistem Logistik Nasional terkait peran BUMN.

6. Sehubungan dengan rencana Pembangunan, revitalisasi dan optimalisasi pelabuhan di PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), dan PT Pelindo IV (Persero), Komisi VI DPR RI menginisiasi pembentukan Panja Rencana Pembangunan dan Pembiayaan Pelabuhan di Pelindo.
7. Sehubungan dengan hasil audit investigatif BPK terhadap PT. Pelindo II (Persero) dan rekomendasi Pansus Angket Pelindo II, Komisi VI DPR RI meminta Direksi PT Pelindo II (Persero) untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) dan PT. Jasa Armada Indonesia (JAI).
8. Sehubungan dengan hasil audit kinerja BPK terhadap BUMN Transportasi dan Logistik, Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN untuk menindaklanjuti dengan meningkatkan kinerja korporasi dalam rangka peningkatan *good corporate governance*.
9. Komisi VI DPR RI meminta kepada para Direktur Utama PT Pelindo I (Persero), PT Pelindo II (Persero), PT Pelindo III (Persero), PT Pelindo IV (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Djakarta Lloyd (Persero), dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (*lima*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.32 WIB.

Jakarta, 10 Februari 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

FAISOL RIZA, S.S.
A-33